



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KOTA
SERANG



PEMERINTAH
DIGITAL
Birokrasi Berda
DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

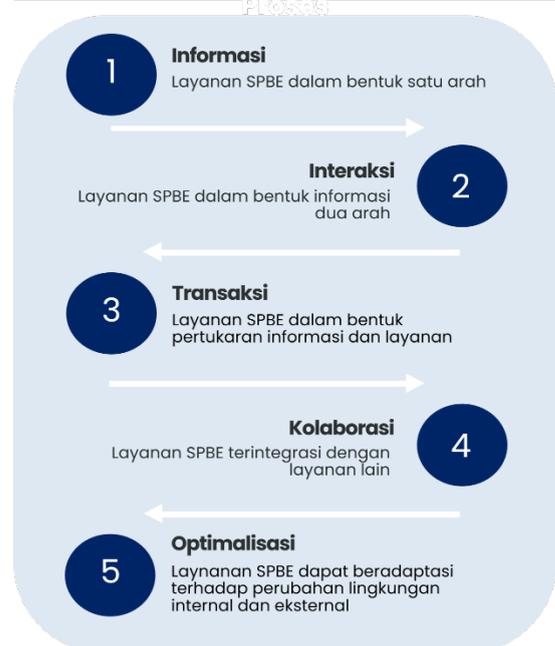
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi

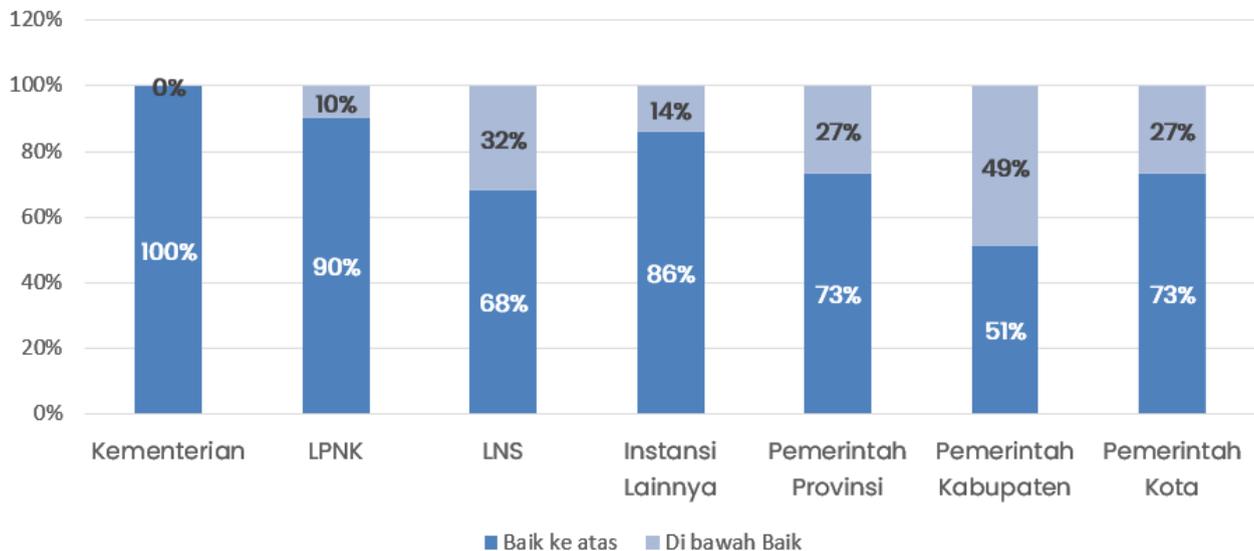


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

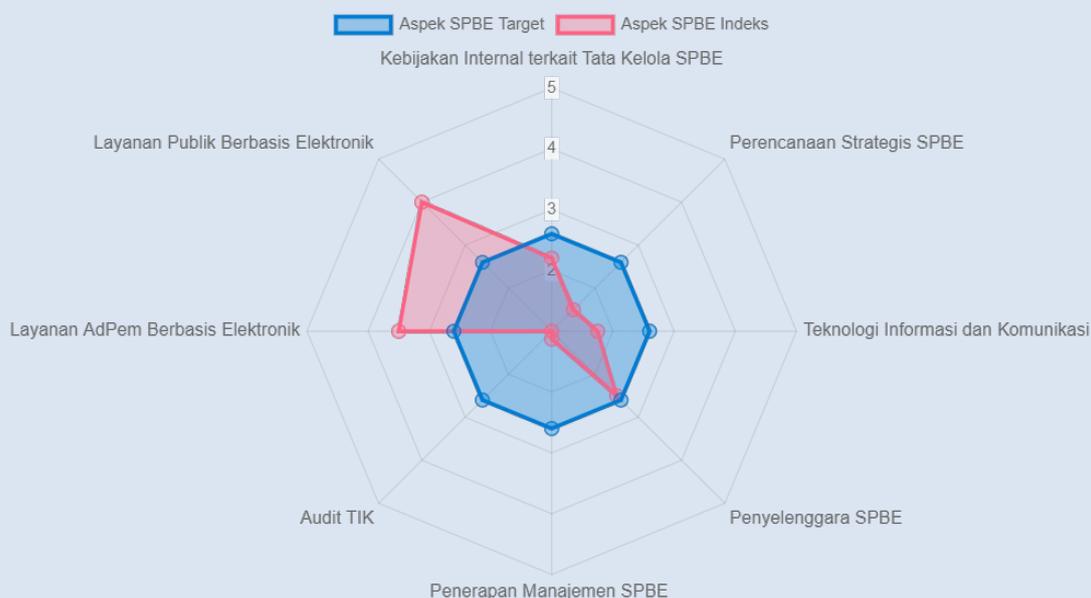
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,60
Domain Kebijakan SPBE	2,20
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,20
Domain Tata Kelola SPBE	1,80
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,09
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,13
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,70
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,50
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,00

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi yaitu dengan adanya Kebijakan Internal Manajemen data, Layanan Pusat Data, Jaringan intra, Penggunaan Sistem penghubung layanan pemerintah Manajemen Keamanan Informasi, dan Tim koordinasi SPBE.

- Kekuatan
Belum terdapat indikator yang menjadi kekuatan dalam aspek ini
- Kelemahan
Namun di sisi lain, kebijakan internal Tata Kelola SPBE yang mengatur tentang Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi, dan Kebijakan Internal Audit TIK sudah ada namun belum memuat pengaturan secara lengkap sesuai pedoman. Serta pada kebijakan internal audit TIK belum disahkan oleh pemimpin tertinggi.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi yaitu dengan adanya Arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE dan Peta Rencana SPBE.

- Kekuatan
Belum terdapat indikator yang menjadi kekuatan dalam aspek ini
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Perencanaan Strategis SPBE terkait dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE belum memuat domain secara lengkap. Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE belum ditunjukkan telah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK, dan belum dilakukan upaya Inovasi Proses Bisnis SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek TIK yang sudah dipenuhi yaitu dengan adanya Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

- Kekuatan
Belum terdapat indikator yang menjadi kekuatan dalam aspek ini
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait dengan Pembangunan Aplikasi SPBE belum terdapat dokumen yang menggambarkan proses lengkap pembangunan aplikasi SPBE. Selain itu, Layanan Pusat Data, Layanan jaringan intra, dan penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masih diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah atau SOP belum ditetapkan secara formal.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE sudah dipenuhi yaitu telah terdapat Tim Koordinasi SPBE yang telah melaksanakan pekerjaan dan kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan
Belum terdapat indikator yang menjadi kekuatan dalam aspek ini
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah masih belum memberikan data dukung penerapan seluruh tugas dan fungsi tim Koordinasi SPBE, yaitu mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah memenuhi yaitu Penerapan Manajemen Keamanan Informasi.

- Kekuatan
Belum terdapat indikator yang menjadi kekuatan dalam aspek ini
- Kelemahan

Namun di sisi lain, seluruh indikator pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini tidak dapat diberikan nilai kematangan yang lebih tinggi disebabkan oleh peta rencana belum memuat atau mengatur hal terkait.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Belum terdapat indikator yang memenuhi dalam aspek ini

- Kekuatan
Belum terdapat indikator yang menjadi kekuatan dalam aspek ini
- Kelemahan
Di sisi lain pada aspek Audit TIK ini belum dilakukan

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dipenuhi pada indikator sebagai berikut Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan, Pengelolaan Barang, Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada aspek ini terdapat indikator yang menjadi kekuatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kearsipan.
- Kelemahan
Tidak terdapat indikator yang menjadi kelemahan dalam aspek ini

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan SPBE telah dipenuhi yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektoral 2, dan Layanan Publik Sektoral 3.

- Kekuatan
Layanan pada Aspek Layanan SPBE yang menjadi kekuatan yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektoral 2, dan Layanan Publik Sektoral 3. Layanan tersebut telah diterapkan memenuhi tingkat kematangan.
- Kelemahan
Tidak terdapat indikator yang menjadi kelemahan dalam aspek ini

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kota Serang. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kota Serang, sudah dapat menggambarkan predikat BAIK dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan dari penerapan SPBE di Pemerintah Kota Serang terletak pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Pada layanan Administrasi Pemerintah berbasis elektronik, data dukung ini dapat dilihat dari penggunaan aplikasi umum. Pada layanan public berbasis elektronik, pengembangan aplikasi sudah sampai pada tahap terintegrasi dengan layanan lain, telah melakukan proses reviu/evaluasi, dan perbaikan sesuai rekomendasi.

Namun di sisi lain, implementasi SPBE di Pemerintah Kota Serang masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK. Pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, kebijakan belum memuat seluruh cakupan yang diatur oleh pedoman serta terdapat kebijakan audit TIK yang disahkan oleh pemimpin tertinggi instansi. Sementara pada Aspek Perencanaan Strategis, Pemerintah Kota Serang memiliki Arsitektur SPBE yang belum memuat domain secara lengkap, Rencana dan Anggaran SPBE yang belum dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK, dan belum dilakukan upaya Inovasi Proses Bisnis SPBE. Dan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait dengan indikator Pembangunan Aplikasi SPBE belum terdapat dokumen yang menggambarkan proses lengkap pembangunan aplikasi SPBE. Selain itu, Layanan Pusat Data, Layanan jaringan intra, dan penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masih diterapkan di sebagian unit kerja/perangkat daerah atau SOP belum ditetapkan secara formal. Pada aspek Penyelenggara SPBE, tim Koordinasi SPBE belum terlihat melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai tugas dan fungsi. Dan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE belum diatur pada kebijakan ataupun peta rencana. Terakhir, aspek Audit TIK belum dilaksanakan.

Pemerintah Kota Serang telah melakukan implementasi SPBE dengan baik pada hampir seluruh aspek. Selain upaya penggunaan berbagai aplikasi umum, data dukung yang diberikan cukup komprehensif disertai penjelasan dengan alur yang mudah diikuti sehingga mudah untuk ditentukan penilaiannya.

Selain aspek yang sudah baik, Pemerintah Kota Serang juga perlu terus ditingkatkan terkait aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK. Untuk Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE perlu dilengkapi pengaturannya sesuai dengan pedoman dan disahkan oleh pemimpin tertinggi instansi. Selain itu, SOP dapat segera diformalkan. Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengembangan aplikasi perlu ditetapkan siklus pembangunannya dan dilakukan penerapannya pada pengembangan aplikasi. Selain itu, penggunaan layanan pusat data, jaringan intra, dan sistem penghubung layanan perlu terus diperluas hingga ke seluruh unit kerja disertai dengan dokumentasi yang tercatat dengan baik. Adapun pada aspek Penyelenggara SPBE dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan SPBE secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsi tim koordinasi SPBE. Dan terakhir pada aspek Manajemen SPBE dan Audit SPBE perlu dipastikan rincian rencana kegiatan telah tercantum dalam peta rencana SPBE yang menjadi dasar implementasi termasuk pembuatan pedoman pelaksanaan/SOP teknis di lapangan.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4